

*Jurnal Skripsi*

***PENGARUH NILAI DAN CITRA FRANCOIS HOLLANDE TERHADAP  
KEBERPIHAKAN PRANCIS KEPADA PEMERINTAH MALI PADA KONFLIK  
TAHUN 2013***

***ADHIANTY SITI MAULANI  
20150510153***

***HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA***

**ABSTRAK**

Dalam penelitian ini membahas mengenai analisa individu yang di dasari pada kasus Pengaruh dari nilai dan citra Presiden Francois Hollande dalam menyetujui intervensi dalam konflik Mali. Nilai dan citra disini adalah sebagai suatu landasan diri dari dalam diri Francois Hollande. Sehingga nilai dan citra tersebut bisa mempengaruhi dalam pengambilan keputusan Francois Hollande sebagai Presiden Prancis. Sehingga penulis menemukan bahwa nilai demokrasi, nasionalisme, dan hak kemanusiaan dalam diri Francois Hollande menjadi sebuah nilai yang mempengaruhi intervensi tersebut.

**ABSTRACT**

*This research aim to analyze someone based on the impact of value and image of Francois Hollande president on approved intervension on Mali conflict. Value and image as self base of Francois Hollande itself. Those factor can affect on taking decission when he was a France president. Writer found out that democraton, nationalism and human right kn Francois Hollande became a value that inffluence the intervention.*

**A. Latar Belakang Masalah**

Permasalahan yang dialami setiap negara pada umumnya dialami juga oleh negara lain dalam cakupan general. Berbagai macam permasalahan dalam bidang ekonomi, politik, keamanan, pendidikan, HAM, dan bahkan konflik diantara negara. Salah satu benua yang masih intens adanya konflik antara negara dan masyarakat nya adalah benua Afrika. Negara-negara di Afrika masih belum bisa menstabilkan keadaan pemerintahannya hingga sekarang setelah perang dunia ke dua. Salah satu negara yang mengalami kejadian tersebut di daratan Afrika adalah negara Mali. Mali sendiri adalah negara yang merdeka pada tanggal 20 Juni 1960 dimana tanggal tersebut sebagai kemerdekaan yang di berikan oleh Prancis pada kala itu sebagai negara yang menjajah Mali, sedangkan Mali sendiri mengakui tanggal kemerdekaannya adalah 22 September 1960 (Andini, 2017).

Hubungan erat antara Mali dan Prancis ini di mulai pada saat Prancis menjadi negara yang menjajah daerah Mali pada tahun 1895-an, di mana pada saat itu Prancis hampir menguasai dan menaklukkan di Afrika bagian barat yang akhirnya mendirikan Afrika Barat Prancis. Negara-negara yang menjadi negara dari jajahan Prancis tersebut antara lain Guinea, Mali, dan Senegal. Setelah kebebasan dan kemerdekaan yang dirasakan, Mali terlepas dari Prancis. Permasalahan pemberontakan sudah terjadi sejak 1961, satu tahun setelah kemerdekaan Mali itu sendiri. Pemberontakan itu di lakukan oleh etnis Tuareg yang menyatakan tidak setuju atas sistem pemerintahan negara Mali pada saat itu. Etnis ini adalah etnis yang sebagian besar berasal dari Azawad, Mali. Pemberontakan ini berawal tentang suatu kebijakan yang melarang etnis Tuareg untuk tinggal dan bekerja di luar wilayah Azawad, kebijakan itu di anggap mendiskriminasi etnis Tuareg yang menyebabkan pemberontakan tersebut (Ervianto, 2013).

Pada awal tahun 2012 tepat nya pada bulan Januari, para pemberontak dari daerah Azawad yang di sebut sebagai *National Movement for the Liberation of Azawad* (MNLA) melakukan kampanye terlebih dahulu untuk segera memberikan keputusan bahwa bagian Azawad khususnya yang di tinggali oleh etnis Tuareg untuk dibebaskan dari negara Mali (Kistyarini, 2012). Pada masa itu Presiden dari Mali sendiri adalah Amadou Toumani Touré, Presiden Amadou sendiri harus digulingkan oleh pihak militer Mali karena dianggap tidak menangani permasalahan dan pemberontakan yang terjadi di Azawad yang akhirnya pada bulan Maret 2012 Presiden Amadou harus meniggalkan jabatan nya.

Kudeta yang dilakukan oleh pihak militer Mali dipimpin oleh Amadou Sanogo dimana mereka menyebut pergerakan atas penggulingan Presiden Mali disebut *National Committee for the Restoration of Democracy and State* (NCRDR). Pada masa setelah penggulingan tersebut, Mali hanya memiliki Presiden dan Menteri sementara yang menjadi kurang nya kontrol pada otonomi-otonomi daerah, sementara hal ini yang di manfaatkan oleh MNLA yang akhirnya menjadikan pemberontakan dan perlawanan yang terjadi (Arieff, 2013). Akan tetapi seiring dengan berjalan nya waktu konflik ini memunculkan seorang aktor baru yaitu Prancis di mana Prancis melakukan beberapa tindakan. Tindakan-tindakan tersebut tidak akan terjadi apabila seorang pemimpin suatu negara dan pemerintah menyetujui rencana tersebut. Pada

masa keikutsertaan Prancis untuk ikut serta dalam konflik ini Prancis sedang di pimpin oleh Presiden Francois Hollande.

Pada masa konflik di Mali, Prancis adalah salah satu negara yang memiliki power yang melakukan intervensi berkelanjutan dalam konflik Mali tersebut. Intervensi itu sangat intens dilakukan pada bulan Januari 2013 dibawah kepemimpinan presiden Prancis yaitu Francois Hollande. Oleh sebab atas apa yang terjadi di Mali dengan intervensi nya Prancis dengan perintah yang di berikan Presiden Fracois Hollande melakukan suatu tindakan dalam konflik tersebut, penulis menganggap hal tersebut bisa menjadi bahan teliti dalam menyelesaikan tugas akhir untuk mencapai strata satu. Bahan teliti ini meliputi nilai dan citra apa yang ada dalam diri Presiden Francois Hollande sehingga menyetujui untuk melakukan intervensi dalam konflik Mali.

## **B. Kerangka Pemikiran Analisis Individu**

Kerangkan pemikiran yang diharapkan bisa di gunakan untuk menjawab atas penelitian ini adalah kerangka Analisis Individu. Dalam studi kasus ini saya akan menjelaskan apa itu sebenarnya “Unit Analisa”, adalah sesuatu hal yang perilakunya, kita jelaskan atau deskripsikan dan kita ramalkan (yang mana hal tersebut menjadi “variabel independen”) dan “unit eksplanasi” yang mana akan berdampak pada unit analisa yang akan henda kita amati. Sehingga pada dasarnya apabila kita ingin menelaah sesuatu dari segi hubungan ininternasional adanya ketidak mungkinan kita secara fisik menelaah dari semua aspek. Karena menurut J. David Singer

*“Dalam setiap bidang kegiatan keilmuan, selalu terdapat berbagai cara memilah-milah dan mengatur fenomena yang di pelajari demi analisis yang sistematis. Baik dalam ilmu fisik maupun ilmu sosial, pengamat harus memilih pusat perhatian, pada bagian-bagian nya atau pada keseleuruhan fenomena itu, pada komppnennya atau pada sistemnya. Misalnya ia bisa memilih mau memperhatikan bunga atau kebunnya, pohon atau hutannya rumah atau kampungnya, remaja nakal atau kelompok gangnya, anggota DPR atau parlemen, dan sebagainya.” (Singer, 1961)*

Dalam tingkat analisis ini juga menerangkan bahwa pertama biasanya untuk menjelaskan prilaku aktor internasional yang biasanya di presentasikan sebagai

sebuah negara berdaulat, terdapat lebih satu aktor dalam negara tersebut yang menyebabkan perilaku tersebut, mulai dari perilaku individual pemimpin, perilaku kelompok, karakteristik negara itu sendiri, hubungan dengan beberapa negara dalam lingkungan regional, sampai struktur hubungan pada tingkat global. Di sisi lain analisis individu ini di dukung oleh pernyataan teori behavioralis bahwa politik itu di dasar atas perilaku politik individual (Morgan P. , *Theories and Approaches to International Politics*, 1981). Menurut para ilmuwan terdapat tiga alasan mendasar bahwa pendekatan analisis individu ini penting;

1. Analisis individu ini percaya bahwa negara-negara tidak melakukan suatu tindakan atau pengambilan keputusan, melainkan adalah para pemimpinnya yang melakukannya. Kita ketahui juga bahwa individu adalah unit analisis yang paling empirik dan mendasar.
2. Adanya keterlibatan suatu individu akan sesuatu situasi akan menimbulkan dampak yang berbeda-beda. Apabila kita tidak mempercayai bahwa citra, nilai, dan kualitas seorang individu berbeda dari yang lain serta keterlibatan individu tersebut bisa mendorong timbul hasil yang berbeda maka kenapa kita harus susah-susah melakukan suatu pemilihan untuk sesuatu?, Dari penjelasan barusan bisa kita telaah bahwa seseorang percaya suatu terjadi dan yang akan terjadi di depan bahwa bagian besar di tentukan oleh siapa yang terlibat dalam proses pembuatan keputusan tersebut.
3. Alasan ketiga dimana para teoritis percaya bahwa dorongan dinamika yang terjadi di kancah internasional pada akhirnya memang muncul dari diri manusia yang paling dalam.

Disisi lain Lasswell menambahkan point penting dalam pemikirannya dengan menggabungkan pemikirannya dengan pemikiran Machiavelli yaitu, bahwa dalam diri manusia sendiri memang memiliki dorongan kepribadian politik yang dasar di mana tujuannya adalah unruk memperoleh kekuasaan. Kekuasaan tersebut akan di gunakan untuk mengendalikan orang lain tentunya. Pelampiasan seseorang terhadap kekuasaan di karena orang tersebut merasa tidak di cintai, lemah, dan merasa tidak terhormat. Para ilmuwan analisis individu ini mengatakan bahwa ada dua faktor yang mendasari orang ingin terlibat dalam dunia politik, pertama adalah kebutuhan untuk

melakukan kontak sosial dengan orang lain dan kebutuhan dalam diri seseorang untuk ingin berprestasi. Dari dua faktor tersebut ilmuwan analisis ini mengerucutkan menjadi sebuah dasar bahwa semua itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri/individu tersebut. Dalam menggunakan analisis individu dengan menggunakan alat "*kepribadian*" sebagai bahan telitinya menggunakan pendekatan mikro yang menyatakan bahwa manusia adalah faktor yang membedakan hasil sebuah kejadian dan bahwa kepribadian adalah determinan pokok dalam sebuah perilaku seseorang.

Di sisi lain pasangan ilmuwan suami istri George melakukan sebuah penelitian terhadap kehidupan dan karir seorang pemimpin yaitu Woodrow Wilson salah satu Presiden Amerika dan menemukan sebuah kesimpulan bahwa "*Kekuasaan memiliki nilai kompensatori yaitu sebagai alat untuk mengembalikan harga diri yang rusak di masa kanak-kanak*" (Mas'ood, Studi Hubungan Internasional Tingkat Analisis dan Reorisis, 1989). Selain pasangan suami istri George ada ilmuwan lain yang mengelompokkan berpengaruhnya kepribadian dalam analisis individu ini adalah James Barber. James memiliki dasar pemikiran dalam analisis individu ini adalah perilaku seorang presiden bukan hasil perhitungan rasional/pemikiran yang matang, akan tetapi adanya upaya untuk memenuhi keinginan pribadi yang ada dalam bawah sadarnya. James Barber melakukan sebuah penelitian terhadap tiga belas Presiden Amerika dan mengelompokkannya menjadi empat dimensi kelompok yaitu pertama "*aktif-positif*" menurut James presiden-presiden yang tergolong dalam kategori ini tertarik dan adanya keinginan memperoleh kepuasan dalam dunia politik karena tujuan yang mereka capai adalah kesempatan untuk berprestasi. Di lihat dari masa lalu nya James menilik presiden-presiden yang termasuk dalam kategori ini memiliki masa kanak-kanak yang memiliki kasih sayang dan "*support*" yang menyebabkan mereka tumbuh menjadi anak yang bangga akan dirinya sendiri. Sedangkan kelompok yang kedua adalah "*aktif-negatif*" di mana berpikir bahwa politik dan kekuasaan adalah hal yang satu dan tanpa disadari adanya keinginan berkesempatan untuk mengendalikan orang lain itulah tujuan akhirnya. Tipe aktif-negatif ini juga pada masa kecilnya di indikasi kekurangan kasih sayang sehingga saat tumbuh dewasa menjadi seorang pemimpin dirinya akan mencapai sesuatu untuk membuktinya. Dalam kategori ini James beranggapan bahwa presiden-presiden dalam kategori ini memiliki kebanggaan dan harga diri yang rendah. Pada masa menjadi seorang pemimpin dia akan menggunakan kekuasaannya dan keunggulannya demi mendominasi lawan nya.

Kategori ketiga adalah “*pasif-positif*” biasanya kategori ini muncul di karena pada masa kecil individu tersebut kelebihan kasih sayang yang menyebabkan adanya kebutuhan akan penghormatan. Sedangkan tipe terakhir yaitu adalah “*pasif-negatif*” adalah presiden-presiden yang menjalankan tugasnya hanya karena dorongan kewajiban memenuhi tugas kemasyarakatan dan dorongan hanya karena kesetiaan akan tanah airnya. Dari keempat topik di atas James Barber menggunakan alat “sejarah kehidupan” dari masing-masing individu yang di kategorikan dengan menerapkan teori psikologi.

Dalam analisis individu ini juga bisa menggunakan dari teorisasi tentang persepsi. Naluri dan kepribadian adalah segi-segi individual yang bersifat static, sedangkan persepsi atau “*citra*” yang di miliki individu bersifat diamik karena persepsi seringkali berubah (Mas'ood, Studi Hubungan Internasional Tingkat Analisis dan Reorisis, 1989). Menurut Kenneth Boulding sebenarnya kita ini bereaksi terhadap citra kita terhadap dunia, salah satu pemikirannya adalah

*“kita harus mengakui bahwa orang-orang yang menentukan kebijaksanaan dan tindakan negara-negara tidak melakukan tanggapan terhadap fakta-fakta situasi yang obyektif..” tetapi terhadap “citra” mereka tentang situasi itu. Yang menentukan perilaku kita adalah persepsi kita tentang dunia, bukan kenyataan dunia itu”.*

Di sisi lain adanya keterhubungan anatara citra, persepsi, dan perilaku di lingkungan internasional adalah bahwa munculnya keputusan politik luar negeri adalah timbulnya sebuah situasi permasalahan, dan sebelum permasalahan itu muncul untuk adanya tanggapan dari oleh para pembuat keputusan akan ada tiga hal yang terjadi. Sebagai berikut pertama adanya stimulus atau rangsangan dari lingkungan yang di sebut “*trigger event*”, kedua adanya upaya untuk mempersepsi stimulus itu di mana pada proses ini seorang individu akan menyeleksi, dan menilai informasi tentang lingkungannya, dan yang terakhir adalah adanya upaya menafsirkan stimulus yang telah di persepsikan itu.

Di sisi lain teorisasi persepsi ini mengatakan bahwa para pembuat keputusan akan di pengaruhi oleh berbagai proses psikologik dan kepribadian yang mempengaruhi persepsi akhirnya. Sistem keyakinan sendiri adalah kumpulan-kumpulan dari keyakinan, citra, atau “*model*” yang menggambarkan tentang dunia dan di percayai oleh seseorang. Sedangkan menurut Holsti sendiri

*“Sistem Kenyakinan terdiri dari serangkaian citra yang membentuk keseluruhan kerangka acuan atau sudut pandang (universe) seseorang. Cita-cita itu meliputi realitas masalalu, masakini, dan realitas yang di harapkan di masadepan, dan referensinilai tentang apa yang “seharusnya terjadi”.*

Sehingga dalam jurnal ini dapat diidentifikasi apakah dalam diri citra dan nilai yang dipercayai oleh Francois Hollande mempengaruhi pengambilan keputusan intervensi Prancis dalam konflik Mali 2013. Berikut adalah sistem pemerintah Prancis.

### **C. Sistem Pemerintah Prancis**

Prancis sendiri adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik. Untuk menjalankan pemerintahannya Prancis menggunakan sistem pemerintahan Semi-Presidensial. Dimana sistem pemerintahan ini adalah di mana Presiden menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan tetapi di bantu oleh menteri di mana perdana menteri itu sendiri di pilih oleh presiden. Sistem pemerintahan semi presidensial dari Prancis itu sendiri sedikit dengan sistem semi presidensial negara-negara pada umumnya, pada umumnya sistem pemerintahan semi presidensial kepala negara akan di pimpin oleh Presiden dan Kepala Pemerintahan di pimpin oleh menteri tetapi kekuasaan Presiden tidak ada batasnya dan memiliki pengaruh besar dalam pengambilan kebijakan di negaranya. Pemilihan presiden sendiri di lakukan secara langsung oleh rakyatnya sendiri, akan tetapi menteri di pilih oleh Presiden. Bentuk pemerintahan Prancis sendiri adalah Republik Parlementer di mana Presiden memiliki kekuasaan tertinggi dan perdana menteri berada di bawah kekuasaan presiden.

Sistem pemilihan Prancis pada umumnya menggunakan Pemilihan Umum secara langsung oleh rakyatnya dengan *Sistem Pluralitas Mayoritas* di mana di berlakukannya *Two Round System* (TWS). Pengertian dari sistem Pluralitas Mayoritas itu sendiri adalah Pemilu akan terjadi hingga putaran kedua untuk mendapatkan kelebihan suara antara dua belah pihak, di mana rumus yang di gunakan adalah 50%+1.

Untuk lembaga pemerintahan pusat terbagi menjadi tiga yaitu lembaga pemerintahan Legislatif, lembaga pemerintahan yudikatif, dan lembaga pemerintahan eksekutif. Tetapi lembaga yang di pilih secara langsung dengan menggunakan

PEMILU adalah lembaga legislatif dan lembaga eksekutif. Dalam lembaga legislatif sendiri Prancis menggunakan sistem parlemen dua pintu atau lebih di kenal dengan Bikameral, Bikameral sendiri adalah dimana dalam tatanan legislatif terbagi menjadi dua lembaga lagi yang memiliki fungsi dan tugas berbeda satu sama lain. Di Prancis terbagi menjadi dua kamar yaitu *National Assembly* (Sidang Nasional) dan *Perliament Sovereignty* (Senat Tidak Berpendapat). Tugas umum dari dua lembaga legislatif tersebut adalah mengawasi referendum yang berjalan serta mengkaji segala kebijakan yang akan di jalankan dalam badan pemerintah. Dari dua kamar badan legislative ini ada perbedaan satu sama lain. Pertama Senat sendiri di pilih oleh *Electorall College* atau disebut Dewan Lokal yang di mewakili daerah-daerah atau kota di Prancis di mana Dewan Lokal ini terdiri dari Wakil Municipal. Pada awalnya masa jabatan dari senat sendiri itu selama sembilan tahun akan tetapi pada tahun 2004 berubah menjadi 6 tahun saja. Sebenarnya kekuatan senat sendiri tidak sekuat dengan *National Assembly* karena pada dasarnya Senat di pilih oleh sebuah dewan untuk mewakili daerah-daerah yang terbilang cukup kecil. Berbeda dengan *National Assembly* pada dasarnya dipilih oleh rakyat.

#### **D. Politik Luar Negeri Prancis**

Sama dengan Indonesia yang memiliki dasar dalam melakukan hubungan internasional, Prancis juga memiliki dasar dalam melakukan hubungan internasionalnya. Dasar hubungan internasional Prancis tersebut adalah *Politique Independence*<sup>1</sup>, yang artinya Prancis berhak untuk menjalin hubungan dengan negara manapun dan tetap menjunjung tinggi nilai perdamaian serta aktif dalam uapaya perdamaian dunia. Pada saat itu Prancis menjadi salah satu negara yang berperan dalam penyelesaian perang dunia ke-2 yang bersekutu dengan pihak sekutu pada masa itu adalah Amerika Serikat, Inggris, Uni Soviet, beserta negara lain nya. Sejak selesai nya perang dunia ke-2 terbentuk lah Perserikatan Bang-Bangsa di mana pada masa itu Prancis menjadi salah satu pelopor terbangun nya PBB dan menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB hingga sekarang.

---

<sup>1</sup> Informasi ini didapatkan dalam Website Kementerian Luar Negeri Indonesia.

Berbeda dengan masa Nicholas Sarkozy, Francois Hollande sebagai presiden terpilih setelah Nicholas Sarkozy menghadapi dan melakukan manuver politik Internasional yang berbeda. Pada masa jabatan Presiden Francois Hollande sekitar tahun 2012-2016 banyak isu pergolakan yang terjadi sehingga menyebabkan Prancis terbilang sangat aktif di kancah Internasional. Walaupun pada masa itu Presiden Francois Hollande di pandang menjadi salah satu Presiden yang kurang populer daripada presiden lain nya. Strategis mediasi, Eropenisasi masih di lakukan oleh Presiden Francois Hollande itu. Pada masa kepemimpinan Francois Hollande banyak permasalahan yang sebenarnya di selesaikan yang pada masa jabatan Nicholas Sarkozy belum terselesaikan. Di sisi lain terselesaikan nya berbagai macam masalah, akan tetapi masalah-masalah muncul baru dan terbilang cukup berat pada masa itu. Salah satunya isu kestabilan keanggotaan Uni Eropa di mana muncul kembali isu keinginan keluarnya Inggris dari keanggotaan Uni Eropa, serta negara-negara sekutu Prancis di Afrika yang notabennya adalah negara-negara bekas kolonialis Prancis yang mengalami ketidak stabilan dalam pemerintahannya.

Francois Hollande berusaha untuk mewujudkan kepentingan nasionalnya pada masa itu tanpa adanya keterhubungan hegemoni dengan negara-negara sekutu seperti Amerika, Inggris, Jerman, dsb. Walaupun Prancis mulai menjalankan kepentingan nasionalnya dengan mengesampingkan keterhubungannya dengan negara-negara sekutu, pada masa Francois Hollande negara Prancis mulai menjalin hubungan baik dengan negara-negara seperti Iran, Libanon, Qatar, serta Suriah. Pada masa Francois Hollande juga sebenarnya kekuatan militer Prancis mengenai kekuatan Nuklir nya tidak terlalu di bahas, akan tetapi ada kekhawatiran dari koalisi Prancis yaitu NATO cukup khawatir karena partai yang mengusung Francois Hollande adalah partai sayap kiri yang membuat adanya kekhawatiran bahwa kebijakan-kebijakan yang di ambil oleh Francois Hollande lebih condong pada ideologi-ideologi sayap kiri. Akan tetapi pada Francois Hollande ada nya persiapan isu penarikan tentara-tentara di Afganistan. Saat kepemimpinan Francois Hollande sendiri banya kebijakan atau keputusan yang di ambil Prancis di duga karena keberpengaruhan partai di mana Francois Hollande berasal. Salah satunya promosikannya tentang hak-hak asasi manusia serta kebijakan tentang kebudayaan yang terus di tekankan. Di sisi politik luar negeri Prancis pada masa Francois Hollande banyak kerkibalat pada hubungan Multilateral regional yang banyak mengeluarkan kebijakan untuk negara-negara di benua Afrika dan Timur

Tengah. Salah satunya adalah *Middle East and North Africa* (MENA) sebagai wujud dari aspek Geopolitik di Timur-Tengah dan Afrika Utara yang berlandaskan mengejar kepentingan utama Prancis. Kepentingan utama Prancis pada masa Francois Hollande sendiri adalah keamanan energi, ekspor senjata, dan stabilitas regional.

#### **E. Hubungan POLitik Luar Negeri Prancis dan Mali**

Pada dasarnya hubungan Mali dan Prancis memang sudah terjalin sejak lama. Pada masa kolonialisasi yang dilakukan oleh Prancis sebenarnya Mali adalah salah satu negara yang menjadi negara koloni dari Prancis. Kolonialisasi yang dilakukan oleh Prancis kepada Mali terbilang cukup lama, dari tahun sekitar 1800-an hingga 1960-an Prancis masih melakukan kolonialisasi terhadap Mali. Hingga akhirnya Mali di berikan kemerdekaan oleh Prancis pada tahun 1960 bulan Juni tanggal 20. Kolonialisasi yang dilakukan oleh Prancis terbilang cukup lama yang akhirnya banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan negara Mali hingga sekarang. Salah satunya adalah di mana bahasa nasional dari Mali sendiri adalah bahasa Prancis. Hal tersebut menyebabkan Mali dan Prancis tergabung dalam organisasi Francophonie, organisasi tersebut adalah organisasi bagi negara-negara yang menggunakan bahasa Prancis sebagai bahasa nasionalnya.

Setelah terlepasnya Mali dan di berikan kemerdekaan oleh Prancis sebenarnya hubungan Prancis dan Mali masih terjalin sangat erat hingga sekarang. Salah satunya yang paling penting adanya kantor kedutaan besar Prancis di Mali sejak tahun 1961 di mana duta besar pertama Prancis yang di terima di Mali adalah Fernand Wibaux (Mali, Cooperation decentralisee, 2018). Dengan adanya kantor kedutaan besar Prancis di Mali hal itu bisa menjadi sebuah bukti bahwa semenjak Prancis tidak menjadikan Mali sebuah negara kolonialisme semenjak tahun 1960, Prancis sudah mengakui Mali menjadi sebuah negara secara *de facto* and *de jure*. Serta sebaliknya Mali juga memiliki kedutaan besar Mali di Prancis lebih tepatnya di kota Paris.

#### **F. Sejarah Konflik Mali**

Konflik antara Pemerintah Mali dan Kelompok pemberontak MNLA sudah di mulai sejak dahulu. Hal ini bisa di lihat setelah kebebasan dan kemerdekaan yang

dirasakan Mali terlepas dari Prancis. Permasalahan pemberontakan sudah terjadi sejak 1961, satu tahun setelah kemerdekaan Mali itu sendiri. Pemberontakan itu dilakukan oleh etnis Tuareg yang menyatakan tidak setuju atas sistem pemerintahan negara Mali pada saat itu. Etnis ini adalah etnis yang sebagian besar berasal dari Azawad, Mali. Pemberontakan ini berawal tentang suatu kebijakan yang melarang etnis Tuareg untuk tinggal dan bekerja di luar wilayah Azawad, kebijakan itu dianggap mendiskriminasi etnis Tuareg yang menyebabkan pemberontakan tersebut.

Pemberontakan ini sebagai bibit awal banyaknya pemberontakan yang terjadi di Mali yang dilakukan di beberapa daerahnya. Pemberontakan pertama yang dilakukan secara fisik adalah pada tahun 1963, saat itu pemberontakan masih bisa ditangani oleh pihak pemerintah yang dipimpin oleh Kapten Diby Sillas Diara. Pada saat itu juga, undang-undang mengenai darurat militer pertama kali diserukan bagi seluruh penduduk sipil untuk tidak mendekati daerah Azawad. Setelah pemberontakan tersebut belum ada lagi pemberontakan yang dianggap besar di daerah Mali karena pada awal tahun 1970 hingga akhir 1980-an daerah Mali mengalami kekeringan dan kebanyakan kejadian tersebut terjadi di Azawad yang akhirnya mengharuskan banyak etnis Tuareg mengungsi ke negara-negara tetangga contohnya adalah negara Libya.

Banyak dari penduduk Azawad tersebut yang pada masa pemberontakan pindah ke Libya sehingga mereka direkrut oleh militan Libya yang bernama "Legiun Islam". Pada akhirnya memberikan mereka ilmu dan persenjataan untuk melakukan pemberontakan di Mali pada sekitar tahun 1991. Namun pemberontakan itu bisa ditadam karena pada saat itu presiden Mali yaitu Alpha Konare memberikan otonomi yang cukup bagi Azawad yang akhirnya meredakan konflik untuk beberapa waktu. Setelah itu pada tahun 1992 pemilu pertama diselenggarakan di Mali.

Setelah kejadian tersebut pemberontakan yang terjadi di Mali tidak terlalu intensif secara fisik, akan tetapi secara perpolitikan banyak gesekan-gesekan yang terjadi. Sehingga pada awal tahun 2006 Mali menyetujui pemberian otonomi daerah bagian daerah padang pasir utara yang cukup bagi daerah Azawad yang dituntut oleh etnis Tuareg. Pada sekitar tahun 2007 hingga 2009 banyak dari pasukan Tuareg yang dahulunya adalah anggota "Legiun Islam" ikut menjadi salah satu partisipan dalam konflik di Libya. Setelah konflik di Libya selesai pada tahun 2011 tentara-tentara

“Legium Islam” yang berasal dari Mali khususnya daerah Azawad kembali ke daerah Azawad dan merencanakan untuk membuat negara baru yang bernawa Azawad.

Pada awal tahun 2012 tepatnya pada bulan Januari, para pemberontak dari daerah Azawad yang disebut sebagai National Movement for the Liberation of Azawad (MNLA) melakukan kampanye terlebih dahulu untuk segera memberikan keputusan bahwa bagian Azawad khususnya yang ditinggali oleh etnis Tuareg untuk dibebaskan dari negara Mali. Azawad sendiri memang kebanyakan di tempati oleh etnis Tuareg tetapi Azawad sendiri adalah 60% bagian dari Mali dan kemungkinan kecil apabila pemerintah akan dengan sukarela melepaskan daerah Azawad menjadi negara merdeka. Pada masa itu Presiden dari Mali sendiri adalah Amadou Toumani Touré, Presiden Amadou sendiri harus digulingkan oleh pihak militer Mali karena dianggap tidak menangani permasalahan dan pemberontakan yang terjadi di Azawad yang akhirnya pada bulan Maret 2012 Presiden Amadou harus menanggalkan jabatannya.

Kudeta yang dilakukan oleh pihak militer Mali dipimpin oleh Amadou Sanogo dimana mereka menyebut pergerakan atas penggulingan Presiden Mali disebut National Committee for the Restoration of Democracy and State (CNRDR). Pada masa setelah penggulingan tersebut, Mali hanya memiliki Presiden dan Menteri sementara yang menjadi kurangnya kontrol pada otonomi-otonomi daerah, sementara hal ini yang dimanfaatkan oleh MNLA yang akhirnya menjadikan pemberontakan dan perlawanan yang terjadi. Dari pemberontakan yang terjadi tersebut dan kurangnya kontrol dari pemimpin pemerintahan pada masa itu, akhirnya Azawad pada 6 April 2012 jatuh di tangan MNLA. Keberhasilan yang didapatkan oleh MNLA ini sendiri dibantu oleh beberapa kelompok lain sebagai berikut ada Islam Ansar Dine, Al-Qaida in the Islamic Maghreb (AQIM), dan the Movement for Unity and Jihad in west Africa (MUJAO). Pada awalnya kelompok-kelompok tersebut memang ingin membantu MNLA untuk dapat memerdekakan Azawad, akan tetapi dibalik bantuan tersebut Islam Ansar Dine dengan AQIM dan MUJAO ingin mengambil alih Azawad dan mengatur pemerintahan Azawad dengan hukum-hukum islam dalam segala aspeknya (BBC, 2013). Dari kejadian tersebut untuk ke-dua kalinya MNLA harus merebut kembali Azawad dan pertempuran tersebut terjadi di Gao.

## **G. Intervensi Prancis dalam Konflik Mali**

Keterlibatan Prancis terhadap konflik di Mali ini mulai pada tahun 2013. Pada saat itu juga Presiden Francois Hollande menjabat baru sekitar 1 tahun kurang. Setelah mengetahui keadaan di Mali sedang mengalami konflik yang tidak kunjung selesai akhirnya Prancis mulai memberikan bantuan pada Mali. Bantuan-bantuan yang di berikan oleh Prancis dimulai dari bantuan militer dan resolusi-resolusi yang disetujui oleh PBB. Selama satu tahun masa konflik di Mali Prancis sudah melakukan empat gerakan resolusi yaitu resolusi 2056, 2071, dan 2085 yang terjadi pada tahun 2012 sedangkan pada tahun 2013 terjadi resolusi 2100. Tujuan empat resolusi tersebut agar konflik di Mali segera terselesaikan dan untuk mengundang respon dari negara-negara lain atas konflik di Mali.

Disisi lain keadaan di Mali semakin kacau dengan digulingkan nya Presiden Toure oleh militernya. Setelah itu dengan mudah nya kelompok NMLA yang di bantu oleh kelompok-kelompok lain akhirnya bisa merebut daerah Azawad. Setelah jatuhnya daerah Azawad yang menjadi 60% dari kekuasaan Mali jatuh ditangan NMLA, kelompok NMLA mulai memberlakukan hukum-hukum islam di daerah Azawad. Akhirnya pada tahun 2013 dimana Presiden sementara Mali yaitu Dioncounda Traore secara jelas mengatakan bahwa Mali membutuhkan bantuan dari pihak. Hal ini dilakukan karena pemerintahan Mali sudah mulai kewalahan untuk menahan pemberontakan yang dinilai sudah mulai mendekati Bamako atau ibu kota negara Mali tersebut. Akhirnya secara gamblang Mali meminta bantuan PBB dan personal kepada Prancis untuk membantu pemerintahan Mali dalam menangani konflik tersebut.

Pada akhir tahun 2013 Prancis akhirnya dianggap berhasil menjatuhkan pasukan MNLA dan mundur untuk tidak kembali menyerang daerah Bamako. Hal ini di tunjukan kembali dengan pengurangan tentara bantaun yang pada awalnya berjumlah 4500 personil menjadi 1000 personil. Penguranagn personil tentara Prancis perlahan digantikan oleh tentara perdamaian PBB. Disisi lain tentara Prancis akan terus menjaga kedamaian di Mali untuk beberapa waktu dikarena tercantum dalam resolusi 2100 bahwa Prancis memiliki peran penting dalam perdamaian konflik di Mali.

## **H. Nilai dan Citra yang dipercayai Francois Hollande.**

Francois Hollande lebih memilih untuk menjadi seorang Ateis. Dalam nilai-nilai ateis yang dia percayai adalah bahwa dia tidak mempercayai akan adanya Tuhan dalam segala bentuk apapun. Dalam wawancara pada tahun 2002 Francois Hollande mengatakan “ Saya telah sampai pada kesimpulan yang jelas bahwa bagi saya Tuhan tidak ada, bukan sebaliknya” (Firman, 2018). Tetapi dia tetap menghargai segala bentuk agama yang ada di dunia. Francois Hollande sangat megagumi sikap ibunya yang rendah hati, peduli terhadap manusia, akan tetapi Francois Hollande tidak mau dasar-dasar kebaikannya tersebut didasari karena adanya Tuhan (Duchemin, 2014).

Jadi menurut Francois Hollande kebaikan dan keburukan akan selalu ada tetapi hal itu tanpa harus ada didasari karena sesuatu, tetapi karena hal itu memang menjadi sebuah sifat alamiah bagi setiap umat manusia. Benar tidaknya sesuatu bagi Francois Hollande itu tergantung atas dari kepentingan pribadi seseorang nya tersebut yang bisa masuk logika orang tersebut (Hollande, 2012). Nilai tersebut akan selaras dengan nilai kepercayaan nya sebagai seorang Ateis.

Dalam ideologi dalam menjalankan sebuah pekerjaannya sebagai seorang Presiden Francois Hollande adalah tipikal orang yang menjunjung nilai nasionalisme yang tinggi. Nilai nasionalisme ini akan dia dahulukan di atas segalanya, sehingga bagi Francois Hollande kepentingan negara Prancis dibenarkan di atas segalanya. Salah satu statement yang sangat kuat pada masa pemerintahan Presiden Francois Hollande adalah “Prancis memiliki masalah dengan Islam” (Armandhanu, 2016). Dalam statement ini menunjukkan bahwa Francois Hollande adalah tipikal pemimpin yang akan melakukan segalanya demi negaranya. Francois Hollande menginginkan segala agama bisa hidup dengan baik di Prancis sehingga dia menyebutkan statement seperti hal tersebut karena banyaknya kasus teroris yang terjadi di Prancis pada masa pemerintahannya.

Nilai Nasionalisme ini dia hubungkan erat dengan nilai demokrasi. Demokrasi adalah salah satu yang sangat sering disebutkan oleh Presiden Francois Hollande dalam berbagai statment. Francois Hollande mengatakan bahwa demokrasi adalah sebuah nilai yang harus selalu dijunjung dimanapun itu berada karena dengan demokrasi Francois Hollande percaya bahwa kedamaian itu sendiri akan tercapai tanpa adanya kesenjangan satu dengan yang lainnya. Hak-Hak asasi kemanusiaan pun

menjadi sebuah tujuan dari demokrasi yang di percayai Francois Hollande (Corre, 2017).

Nilai point nasionalisme, demokrasi, dan mengedepankan hak asasi manusia inilah yang menjadi sebuah nilai yang dipengaruhi oleh jalan karir dari Francois Hollande sendiri. Nilai yang didapat dari keluarganya inilah yang membentuk gaya pengambilan dari perpolitikan Francois Hollande saat menjadi seorang Presiden menurut James Barber. Francois Hollande menganggap bahwa hidupnya harus terus membuktikan bahwa dirinya adalah seseorang yang hebat dan bisa diakui oleh lingkungannya. Pada masa menjadi seorang politikus dalam negara Prancis, Francois Hollande terus membuktikan prestasi-prestasinya dengan terus muncul dalam dunia perpolitikan Prancis. Semua berubah setelah dia menjadi seorang Presiden hal ini menunjukkan dia harus menunjukkan kehebatannya dalam kancah Internasional.

Intervensi Prancis terhadap konflik Mali dimana Presiden Francois Hollande menjadi Presiden Prancis telah dipengaruhi atas citra nilai yang di anut oleh Presiden Francois Hollande. Hal ini telah di jelaskan dari pada masa lalu Francois Hollande yang memiliki ayah bersifat disiplin, tegas, dan sangat kritis hingga membuat Francois Hollande kecil menganggap sang ayah tidak menyanyanginya telah menunjukkan bahwa hal tersebut mempengaruhi pengambilan keputusan Francois Hollande. Tipe kepribadian Francois Hollande dalam spesifikasi ilmuwan James Barber adalah Aktif-Negatif yang di indikasi bahwa pada masa kecilnya kurang mendapatkan kasih sayang dari lingkungannya sehingga akan membuat gaya kepemimpinan orang tersebut cenderung menggunakan kekuasaannya untuk mendominasi sesuatu.

Sehingga citra dan nilai Francois Hollande dianggap memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan Prancis dalam konflik Mali tersebut. Walaupun nilai dan citra dalam diri Francois Hollande tidak terlihat dengan jelas akan tetapi nilai dan citra tersebut tertanam dalam diri Francois Hollande yang mempengaruhi pengambilan keputusan tersebut apabila kita melakukan analisa individu terhadap Francois Hollande.

Nilai yang tertanam dalam diri Francois Hollande adalah nilai Demokrasi yang sangat tinggi. Dalam beberapa waktu Francois Hollande mengatakan bahwa demokrasi harus ditegakkan di manapun itu berada. Dalam konflik Mali ini karena kelompok MNLA menginginkan sebuah negara dengan menggunakan syariat

islam. Hal ini yang dianggap oleh Francois Hollande sebagai hal yang salah. Karena dimata Francois Hollande tindakan kelompok dalam menggunakan cara konflik adalah suatu tindakan kejahatan dalam demokrasi. Karena kita tahu berarti apabila nilai syariat islam diterapkan di negara Mali maka bagi penduduk Mali yang tidak memeluk agama islam akan di anggap sebagai masyarakat yang dipaksa untuk mengikuti aturan suatu agama. Hal tersebut yang menurut Francois Hollande menyalahi aturan.

## **I. Persepsi Francois Hollande dalam Konflik Mali**

Intervensi Prancis terhadap konflik Mali dimana Presiden Francois Hollande menjadi Presiden Prancis telah dipengaruhi atas citra nilai yang di anut oleh Presiden Francois Hollande. Hal ini telah di jelaskan dari pada masa lalu Francois Hollande yang memiliki ayah bersifat disiplin, tegas, dan sangat kritis hingga membuat Francois Hollande kecil menganggap sang ayah tidak menyanyanginya telah menunjukkan bahwa hal tersebut mempengaruhi pengambilan keputusan Francois Hollande. Tipe kepribadian Francois Hollande dalam spesifikasi ilmuwan James Barber adalah Aktif-Negatif yang di indikasi bahwa pada masa kecilnya kurang mendapatkan kasih sayang dari lingkungan nya sehingga akan membuat gaya kepemimpinan orang tersebut cenderung menggunakan kekuasaannya untuk mendominasi sesuatu.

Sehingga citra dan nilai Francois Hollande dianggap memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan Prancis dalam konflik Mali tersebut. Walaupun nilai dan citra dalam diri Francois Hollande tidak terlihat dengan jelas akan tetapi nilai dan citra tersebut tertanam dalam diri Francois Hollande yang mempengaruhi pengambilan keputusan tersebut apabila kita melakukan analisa individu terhadap Francois Hollande.

Nilai yang tertanam dalam diri Francois Hollande adalah nilai Demokrasi yang sangat tinggi. Dalam beberapa waktu Francois Hollande mengatakan bahwa demokrasi harus ditegakkan di manapun itu berada. Dalam konflik Mali ini karena kelompok MNLA menginginkan sebuah negara dengan menggunakan syariat islam. Hal ini yang dianggap oleh Francois Hollande sebagai hal yang salah. Karena dimata Francois Hollande tindakan kelompok dalam menggunakan cara konflik

adalah suatu tindakan kejahatan dalam demokrasi. Karena kita tahu berarti apabila nilai syariat Islam diterapkan di negara Mali maka bagi penduduk Mali yang tidak memeluk agama Islam akan dianggap sebagai masyarakat yang dipaksa untuk mengikuti aturan suatu agama. Hal tersebut yang menurut Francois Hollande menyalahi aturan.

Nilai nasionalisme yang tinggi juga tertanam dalam diri Francois Hollande. Nilai ini tertanam dengan cara Francois Hollande menganggap bahwa Mali adalah masih sebagian dari Prancis. Karena Francois Hollande menganggap bahwa segala bentuk kolonialisme yang dilakukan oleh Prancis dahulu di Mali adalah suatu tindakan yang salah, sebab itu Francois Hollande merasa Prancis memiliki utang budi kepada Mali. Francois Hollande juga berterimakasih kepada penduduk di benua Afrika yang telah menggunakan bahasa Prancis sebagai bahasanya nasionalnya. Maka dalam analisa individu ini Francois Hollande dianggap merasa memiliki rasa tanggung jawab sebagai warga negara Prancis khususnya sebagai Presiden Prancis untuk memperbaiki hal tersebut. Nilai ketiga yang dianggap sangat penting bagi Francois Hollande itu sendiri adalah nilai kemanusiaan atau hak asasi manusia. Francois Hollande menilai bahwa tindakan yang dilakukan oleh MNLA di Mali ini telah melanggar nilai hak asasi manusia. Dalam statment di sidang darurat keamanan PBB Francois Hollande mengatakan bahwa nilai hak asasi di Mali telah dilanggar sehingga Prancis menyerukan dewan keamanan PBB untuk mengambil tindakan secepatnya.

## **J. Kesimpulan**

Dari kesimpulan di atas nilai dalam diri Francois Hollande dianggap mempengaruhi bentuk pengambilan keputusan Francois Hollande sebagai Presiden Prancis dalam konflik Mali. Walaupun nilai tersebut tidak muncul dengan jelas dalam keseharian Francois Hollande. Sehingga penulis meyakini bahwa analisa individu ini memang memiliki pengaruh yang cukup kuat dalam pengambilan suatu keputusan di suatu negara. Apalagi sebuah negara yang memiliki sistem presidensial atau semi-presidensial seperti Prancis. Apalagi sebuah negara dengan sistem monarki dimana keputusan berada dalam tangan seorang raja.